

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Alif Ilman Mansyur dkk, Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi), Widina Bhakti Persada, Bandung, Tahun 2022.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah, Kencana, Jakarta, Tahun 2016.
- Andi Mursidi dkk, Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Lakeisha, Klaten, Tahun 2020.
- Ario Prio Agus Santoso, Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Tahun 2022.
- Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2021.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2016.
- Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media, Bandung, Tahun 2018.
- Djoko Sarwoko, Reward Bagi "Whistleblower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Rakernas Mahkamah Agung, Jakarta, Tahun 2011.
- Fitri Wahyuni dkk, Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di era Pandemi COVID-19, Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, Bandung, Tahun 2021.
- Hengki Mangiring Parulian Simarta, Pengantar Pendidikan Anti Korupsi, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, Tahun 2020.
- I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2016.
- Idik Saeful Bahri, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan, Bundaran Hukum, Kuningan, Tahun 2021.
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penerbit Prenada Media, Depok, Tahun 2018.
- Kadarudin, Penelitian Di bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Penerbit Formaci, Semarang, Tahun 2021.
- Kasmanto Rinaldi dkk, Pendidikan Anti Korupsi, Cendikia Mulia Mandiri, Batam, Tahun 2023.
- Lalu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani, Kekhususan Tindak Pidana Korupsi, Mataram University Press, Mataram, Tahun 2019.

- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Penerbit PT Alumni, Bandung, Tahun 2022.
- Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, Tahun 2019.
- Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2007.
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2020.
- Satya Darmayani dkk, *Pendidikan Anti Korupsi*, Widina Bhakti Persada, Bandung, Tahun 2022.
- Widyo Pramono, *Melawan Korupsi Tanpa Gaduh*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, Tahun 2019.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
- Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. JURNAL:

- Adi Syahputra Sirait, Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Tahun 2019.
- Antonius Yoseph Bou, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Tahun 2020.
- Ardiva Naufaliz Azzahra, Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2022.
- Ayu Diah Pradnya Swari dan Ni Nengah Adiyaryani, Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2018.
- Bagus Diyan Pratama, Analisis Kebijakan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2023.
- Bahrudin Machmud dkk, Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Tahun 2021.
- Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, Model Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Janabara, Tahun 2020.
- Husin Wattimena, Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Tahun 2016.
- Kurniawan Harahap, Implementasi Hak-hak *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021.
- Laura Naomi Rotua Gultom, Studi Komparatif antara *Justice Collaborator* dengan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2020.

- Lilik Mulyadi, Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Masa Mendatang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tahun 2014.
- Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawir, Baharuddin Badaru, Analisis Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ditinjau Dari Aspek *Justice Collaborator*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2022.
- Nixson Syafrudin, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013.
- Nomero Armandheo Simamora dan Edi Pranoto, Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai *Justice Collaborator* Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tahun 2023.
- Nur Afifah, Iqbal Kamalludin, Yusril Bariki, Politik Hukum Progresif Dalam Perkembangan *Justice Collaborator* Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang Di Indonesia, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Tahun 2022.
- Taufik Nur Ichsan, Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021.
- Tri Wahyu Widiastuti, Korupsi dan Upaya Pemberantasannya, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Tahun 2009.
- Wini Kusumawardhani dan Subekti, Upaya Perlindungan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2019.